

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa

Asnidar¹, Novia Sintia Hardi²

Fakultas Ekonomi Universitas Samudra

¹email: nidar0588@gmail.com

²email: noviasintia@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Langsa. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa belanja modal dan kinerja keuangan yang dihitung dari Pendapatan Asli Daerah, Total Penerimaan Daerah tahun 2007-2017. Metode analisis data yang digunakan adalah persamaan regresi linier sederhana, uji t, uji koefisien determinasi (R^2). Hasil persamaan diperoleh $Y = 99,63 + 9,79X$. Berdasarkan nilai konstanta sebesar 99,63 maka kinerja keuangan di Kota Langsa bernilai positif sebelum dipengaruhi oleh belanja modal. Koefisien regresi sebesar 9,79 menunjukkan bahwa belanja modal memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan di Kota Langsa dan jika belanja modal meningkat 1% maka kinerja keuangan Kota Langsa akan meningkat sebesar 9,79%. Hasil uji t diperoleh nilai prob t statistik $< 5\%$ ($0,01 < 0,05$) dapat dinyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Kota Langsa. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,503 atau sebesar 50,3% variabel belanja modal memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan Kota Langsa, sedangkan sisanya sebesar 49,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Belanja modal, Kinerja keuangan pemerintah

1. PENDAHULUAN

Peningkatan perekonomian suatu daerah menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai melalui kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilaksanakan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang efektif dan efisien. Analisis keuangan berperan sangat penting sebagai usaha untuk mengidentifikasi cirri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

Sularso (2011), mengatakan dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan

efisiensi, rasio keserasian dan pertumbuhan.

Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang terdapat dalam laporan realisasi APBD yang terdiri dari pendapatan dan belanja daerah. Dari banyaknya komponen yang terdapat dalam laporan realisasi APBD dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh belanja modal. Hal ini disebabkan karena semakin banyak belanja modal maka semakin tinggi pula produktivitas perekonomian dalam hal ini adalah kinerja pemerintah daerah.

Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan kinerja keuangan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah

dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Untuk mengetahui terjadinya peningkatan dapat dilakukan analisis keuangan terlebih dahulu, setelah mengetahui hasilnya maka dapat diketahui juga kinerja tersebut apakah baik atau buruk (Puspitasari, dkk, 2015:2).

Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun yang memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian daerah. Apabila sarana dan prasarana memadai maka

masyarakat akan melakukan aktivitas sehari-harinya dengan aman dan nyaman yang akan berpengaruh terhadap produktivitasnya. Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, dimana salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Kota Langsa merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang terletak di Provinsi Aceh dan salah satu dari 5 Kota yang ada di Provinsi Aceh. Kota Langsa merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2001. Setelah proses pemekaran, maka Kota Langsa diharapkan mampu mengatur keuangan daerahnya. Pada tabel 1 dapat dilihat data belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah Daerah Kota Langsa tahun 2007-2017 yaitu :

Tabel 1. Perkembangan Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun 2007-2017

Tahun	Belanja Modal (Rupiah)	Perkembangan (%)	Kinerja Keuangan (%)	Perkembangan (%)
2007	80.933.646.979	-	3,7	-
2008	66.311.058.352	-18,1	5,3	42,6
2009	69.602.725.030	5,0	3,7	-29,6
2010	70.168.062.360	0,8	4,1	8,7
2011	46.746.252.483	-33,4	4,9	21,0
2012	48.593.745.283	4,0	3,6	-27,2
2013	50.759.677.271	4,5	10,2	185,8
2014	152.653.773.587	200,7	15,1	47,6
2015	156.382.478.924	2,4	13,8	-8,3
2016	339.514.857.412	117,1	11,1	-19,9
2017	396.019.362.598	16,6	12,6	13,3

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah(BPKD) Kota Langsa 2018.

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah Kota Langsa terhadap belanja modal dalam APBK terus mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan anggaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan belanja modal mengalami perubahan setiap tahunnya. Belanja modal terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar Rp 46.746.252.483 atau tahun 2011 dan belanja modal terbesar terjadi pada

tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 339.514.857.412. Jika dilihat secara keseluruhan dai belanja modal di Kota Langsa mengalami kenaikan 2012 sampai dengan tahun 2016. Kenaikan belanja modal di Kota Langsa dikarenakan pihak pemerintah memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana umum yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian pada tahun 2008 dan pada tahun 2011 jumlah

belanja modal mengalami penurunan masing-masing sebesar minus 18,1% dan minus 33,4%. Penurunan belanja modal pada pemerintah daerah Kota Langsa dikarenakan adanya penurunan penerimaan daerah Kota Langsa. Kemudian kinerja keuangan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2009, tahun 2012, tahun 2015 dan tahun 2016 kinerja keuangan mengalami penurunan yang disebabkan terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa mengalami penurunan sedangkan untuk total penerimaan terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa.

2. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Belanja Modal

Menurut Halim dan Abdullah (2007:101), belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.

Sedangkan Nordiawan (2007:33), menyatakan bahwa belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah satu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja operasional. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual

Kategori belanja modal menurut Ghozali (2008) adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengandemikian menambah aset Pemda.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau asetlainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Menurut Halim dan Abdullah (2007:102), jenis-jenis belanja modal, terdiri dari:

1. Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan

sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatandan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatandan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. **Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/penggantian/ peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.
5. **Belanja Modal Fisik lainnya**
Belanja Modal Fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan /penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal. Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Suprpto (2007:24) kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi, pengeluaran hasil kerja organisasi, keputusan pelanggan, serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut (Nugroho dan Rohman, 2012:3).

Susanti dan Saftiana (2009:10) menyatakan kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat. Sehingga mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mahmudi (dalam Deddi dan Ayuningtyas, 2011), secara umum pengukuran kinerja menunjukkan hasil dari implementasi sebuah kegiatan/kebijakan, tetapi pengukuran kinerja tidak menganalisis alasan hal ini dapat terjadi atau mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan terhadap tujuan dari kegiatan/kebijakan. Tujuan penilaian kinerja di sektor publik yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
3. Memperbaiki kinerja periode - periode berikutnya.

4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*).

5. Memotivasi pegawai.

6. Menciptakan akuntabilitas publik.

Menurut Halim (2007), tolak ukur dalam menilai kinerja keuangan daerah yaitu :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing –masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/ perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2007:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gade (2008:100), menyatakan bahwa pendapatan daerah berasal dari semua penerimaan kas daerah dalam periode anggaran menjadi hak daerah. Dalam hal ini dapat melihat bahwa pendapatan daerah diakui dan dicatat berdasarkan asas kas yaitu diakui dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima dan merupakan hak daerah.

Sutrisno (2005:203) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang bersumber dari potensi daerah didalamnya termasuk pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dana perimbangan dan pendapatan pemerintah daerah lainnya yang sah menurut undang-undang. Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah

yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hipotesis

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelola keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa.

Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini yang menggunakan data belanja modal sebagai variabel bebas yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa dan kinerja keuangan sebagai variabel terikat. Kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah (Puspitasari, dkk, 2015:2).

Rasio keungan pemerintah daerah menggunakan rasio kemandirian yang dikemukakan oleh Mahmudi (2011):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Selanjutnya analisis data untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan menggunakan persamaan regresi linier sederhana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010:267):

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Kinerja Keuangan

a = konstanta

b = koefisien regresi

X = Belanja Modal

Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t) dan koefisien determinasi (R^2).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN**Perkembangan Belanja Modal Kota Langsa**

Belanja modal menjadi salah satu pengeluaran dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pengeluaran dari Pemerintah Kota Langsa untuk memenuhi pembangunan yang telah direncanakan. Pengeluaran ini berupa belanja modal. Belanja modal ini besarnya berdasarkan jumlah penerimaan

daerah serta besarnya penetapan untuk belanja modal atas dasar keadaan keuangan daerah dan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Belanja modal Kota Langsa yang digunakan untuk mendukung pembangunan dapat diketahui jumlah dan perkembangannya dari tahun 2007-2017 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Perkembangan Belanja Modal Kota Langsa Tahun 2007 - 2017

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Perkembangan	
		Rupiah	Persentase (%)
2007	80.933.646.979	-	-
2008	66.311.058.352	-14.622.588.627	-18,1
2009	69.602.725.030	3.291.666.678	5,0
2010	70.168.062.360	565.337.330	0,8
2011	46.746.252.483	-23.421.809.877	-33,4
2012	48.593.745.283	1.847.492.800	4,0
2013	50.759.677.271	2.165.931.988	4,5
2014	152.653.773.587	101.894.096.316	200,7
2015	156.382.478.924	3.728.705.337	2,4
2016	339.514.857.412	183.132.378.488	117,1
2017	396.019.362.598	56.504.505.186	16,6

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, 2019

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah belanja modal Pemerintah Kota Langsa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2007 jumlah belanja modal sebesar Rp 80.933.646.979 dan pada tahun 2008 jumlah belanja modal Pemerintah Kota Langsa sebesar Rp. 66.311.058.352 dan pada tahun 2008 perkembangan belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp 14.622.588.627 atau penurunannya sebesar minus 18,1%. Penurunan terjadi dikarenakan kebijakan dari Pemerintah Kota Langsa dalam pembagian belanja daerah dan mengutamakan belanja lainnya. Pada tahun 2009 belanja modal Pemerintah Kota Langsa sebesar Rp 69.602.725.030 atau belanja modal mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar Rp 3.291.666.678 atau sebesar 5%. Pada tahun 2010 belanja modal Pemerintah Kota Langsa sebesar Rp. 70.168.062.360 dan

terjadi kenaikan belanja modal Kota Langsa dari tahun sebelumnya sebesar Rp 565.337.330 atau sebesar 0,8%.

Pada tahun 2011 belanja modal Pemerintah Kota Langsa menurun menjadi sebesar Rp 46.746.252.483 atau terjadi penurunan sebesar Rp 23.421.809.877 atau dengan persentase sebesar minus 33,1%. Penurunan yang terjadi disebabkan oleh peningkatan pada sektor belanja lain seperti belanja pegawai. Pada tahun 2012 belanja modal Pemerintah Kota Langsa sebesar Rp 48.593.745.283 atau terjadi peningkatan belanja modal Pemerintah Kota Langsa sebesar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.847.492.800 atau sebesar 4%. Pada tahun 2013 belanja modal Pemerintah Kota Langsa sebesar Rp 50.759.677.271 atau terjadi peningkatan belanja modal Pemerintah Kota Langsa sebesar Rp 2.165.931.988 atau 4,5%.

Pada tahun 2014 belanja modal Pemerintah Kota Langsa sebesar Rp 152.653.773.587 atau terjadi peningkatan belanja modal Pemerintah Kota Langsa sebesar pesat sebesar Rp 101.894.096.316 dan persentase peningkatan sebesar 200,7%. Kenaikan belanja modal pada tahun ini dikarenakan kebijakan pemerintah Kota Langsa dalam membangun sarana dan prasarana sehingga belanja modal diutamakan. Pada tahun 2015 belanja modal Pemerintah Kota Langsa sebesar Rp.156.382.478.924 atau peningkatannya dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.728.705.337 atau 2,4%. Pada tahun 2016 belanja modal Pemerintah Kota Langsa sebesar Rp 339.514.857.412 atau peningkatan belanja modal Pemerintah Kota Langsa sebesar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 183.132.378.488 atau 117,1%. Pada tahun 2016 belanja modal Pemerintah Kota Langsa

sebesar Rp 396.019.362.598 atau peningkatan belanja modal Pemerintah Kota Langsa sebesar Rp 56.504.505.186 atau 16,6%. Belanja modal pada tahun ini 2016 dan tahun 2017 dikarenakan adanya kebijakan dalam pembangunan Kota Langsa sehingga mengutamakan peningkatan belanja modal.

Perkembangan Kinerja Keuangan Kota Langsa

Pengeluaran Kinerja keuangan daerah pada penelitian ini diketahui dari perbandingan nilai Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah berupa transfer pusat yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil serta sisa penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Kinerja keuangan berdasarkan rasio tersebut dapat diketahui pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Perkembangan Kinerja Keuangan Kota Langsa Tahun 2007 – 2017

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Kinerja Keuangan (%)	Perkembangan (%)
2007	10.887.025.267	292.541.915.033	3,7	-
2008	17.134.694.645	322.850.280.947	5,3	42,6
2009	12.843.093.264	343.765.942.233	3,7	-29,6
2010	14.314.098.075	352.363.772.836	4,1	8,7
2011	21.612.910.030	439.672.135.354	4,9	21,0
2012	16.666.942.465	466.011.853.327	3,6	-27,2
2013	57.243.381.959	560.021.241.915	10,2	185,8
2014	114.168.702.058	756.493.119.913	15,1	47,6
2015	109.116.860.676	788.891.524.132	13,8	-8,3
2016	107.524.781.242	970.215.365.344	11,1	-19,9
2017	124.092.504.605	987.957.855.434	12,6	13,3

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, 2018

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa perkembangan kinerja keuangan Kota Langsa dari tahun 2007-2017. Kinerja keuangan di ukur dengan menggunakan rasio kemandirian yaitu dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan, hal ini dilakukan karena dengan adanya penerimaan total pendapatan yang diperoleh dikelola dan kembali menghasilkan

pendapatan dari daerah dan hasil pengelolaan setiap penerimaan.

Pada tahun 2007 Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa sebesar Rp.10.887.025.267 dan total pendapatan sebesar Rp 292.541.915.033 dan diperoleh kinerja keuangan Kota Langsa tahun ini sebesar 3,7%. Pada tahun 2008 Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa sebesar Rp.17.134.694.645 dan total pendapatan Kota

Langsa sebesar Rp 322.850.280.947 serta kinerja keuangannya adalah sebesar 5,3%. Dari kinerja keuangan tahun 2007 sampai ke tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 42,6%.

Pada tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa sebesar Rp 12.843.093.264 dan total pendapatan Kota Langsa sebesar Rp 343.765.942.233 serta kinerja keuangannya adalah sebesar 3,7%. Dari kinerja keuangan tahun 2008 sampai ke tahun 2009 mengalami penurunan sebesar minus 29,6%. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa sementara total pendapatan mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa sebesar Rp 14.314.098.075 dan total pendapatan Kota Langsa sebesar Rp.352.363.772.836 serta kinerja keuangannya adalah sebesar 4,1%. Dari tahun 2009-2010 kinerja keuangan mengalami peningkatan sebesar 4,1%.

Pada tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa sebesar Rp.21.612.910.030 dan total pendapatan Kota Langsa sebesar Rp 439.672.135.354 serta kinerja keuangannya adalah sebesar 4,9%. Dari kinerja keuangan tahun 2010 sampai ke tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 21%. Pada tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa sebesar Rp.16.666.942.465 dan total pendapatan Kota Langsa sebesar Rp.466.011.853.327 serta kinerja keuangannya adalah sebesar 3,6%. Dari kinerja keuangan tahun 2011 sampai ke tahun 2012 mengalami penurunan sebesar minus 27,2%. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah Kota

Langsa sementara total pendapatan mengalami peningkatan.

Pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa sebesar Rp.57.243.381.959 dan total pendapatan Kota Langsa sebesar Rp 560.021.241.915 serta kinerja keuangannya adalah sebesar 10,2%. Sedangkan pada tahun 2012 - 2013 kinerja keuangan mengalami peningkatan sebesar 185,8%. Pada tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa sebesar Rp 114.168.702.058 dan total pendapatan Kota Langsa sebesar Rp.756.493.119.913 serta kinerja keuangannya adalah sebesar 15,1%. Dari kinerja keuangan tahun 2013 sampai ke tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 47,6%.

Pada tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa sebesar Rp.109.116.860.676 dan total pendapatan Kota Langsa sebesar Rp 788.892.524.132 serta kinerja keuangannya adalah sebesar 13,8%. Dari kinerja keuangan tahun 2014 sampai ke tahun 2015 mengalami penurunan sebesar minus 8,3% . Pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa sebesar Rp 107.524.781.242 dan total pendapatan Kota Langsa sebesar Rp.970.215.365.344 serta kinerja keuangannya adalah sebesar 11,1%. Dari kinerja keuangan tahun 2015 - 2016 mengalami penurunan sebesar minus 19,9%. Pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa sebesar Rp.124.092.504.605 dan total pendapatan Kota Langsa sebesar Rp 987.957.855.434 serta kinerja keuangannya adalah sebesar 12,6%. Dari kinerja keuangan tahun 2016 sampai ke tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 13,3%.

Tabel 4. Hasil Analisis Statistik

Variabel	B	T	Sig. t
Konstanta	99.62782	3.022360	0.0144
X	9.786304	2.796305	0.0208
R Square	=	0.503713	
F	=	9.134662	
Sig. F	=	0.014424	

Sumber: Data diolah, 2019

PEMBAHASAN

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Langsa

Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah Kota Langsa dapat diketahui dari hasil analisis data belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah Kota Langsa tahun 2007 - 2017. Analisis data menggunakan persamaan regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi (R^2). Analisis data menggunakan Eviews versi 7,0 dengan hasil pada tabel 4.

Berdasarkan tabel 4 dapat dibuat persamaan regresi linier sederhana yaitu:

$$Y = 99,63 + 9,79X$$

1. Nilai konstanta sebesar 99,63 berarti apabila belanja modal tetap atau tidak mengalami perubahan maka kinerja keuangan Daerah Kota Langsa sebesar 99,63 persen.
2. Koefisien regresi sebesar 9,79 menunjukkan bahwa belanja modal memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan di Kota Langsa, artinya apabila belanja modal meningkat sebesar 1 persen maka kinerja keuangan Kota Langsa akan meningkat sebesar 9,79 persen.

Secara parsial (Uji t) Belanja modal diperoleh nilai prob t statistik $< 5\%$ ($0,01 < 0,05$) dapat dinyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Kota Langsa. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan "diduga belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kota Langsa" dapat diterima.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Nugroho dan Rohman (2012), melakukan dengan judul "Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah)", dimana belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan.

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan R Square (R^2) diperoleh sebesar 0,503 atau sebesar 50,3% variabel

belanja modal memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan Kota Langsa, sedangkan sisanya sebesar 49,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil persamaan regresi linier sederhana $Y = 99,63 + 9,79X$, konstanta menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kota Langsa sebelum dipengaruhi oleh belanja modal sebesar 99,63. Kemudian koefisien regresi sebesar 9,79 menunjukkan bahwa belanja modal memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan Kota Langsa.
2. Hasil uji t diperoleh nilai prob t statistik $< 5\%$ ($0,01 < 0,05$) dapat dinyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Kota Langsa.
3. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,503 atau sebesar 50,3% variabel belanja modal memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan Kota Langsa, sedangkan sisanya sebesar 49,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

6. REFERENSI

- Amrozi, 2016, Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). **Jurnal Ekonomi dan Akuntansi**, Vol. 1, No.1, Hal. 1-10.
- Ardhani, Pungki. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. **Skripsi**, Universitas Diponegoro
- Arsa, I Ketut, 2015, Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/ Kota

- SeProvinsi Bali Tahun 2006 S.D. 2013. **Tesis**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Denpasar.
- Deddy dan Ayuningtyas, Hertianti, 2011, **Akuntansi Sektor Publik**, Jakarta: Salemba Empat.
- Erlina, 2008, **Metode Penelitian untuk Akuntansi dan Manajemen**, Medan: Usu Press.
- Florida A, 2007, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara, **Tesis**, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Gade, LH, 2008, **Analisis Kemandirian Daerah**, Artikel Penelitian.
- Ghozali, Imam, 2007, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**, Semarang: BP-Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, 2007, **Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah**, Yogyakarta: UPP YKPN.
- Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi. 2013. **Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta: Salemba Empat.
- Hari, Adi Priyo, 2006, Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah, **Simposium Nasional Akuntansi (SNA)**: Padang.
- Kementrian Dalam Negeri, 2010, Peraturan Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2010, tentang **Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual**, Jakarta.
- Mahmudi, 2010, **Manajemen Kinerja Sektor Publik**, Yogyakarta: UPP. AMP. YPKN.
- Nugroho, Fajar dan Abdul Rohman, 2012, Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). **Journal of Accounting**, Vol. 1, No.2, Hal. 1-14.
- Nordiawan, 2007, **Akuntansi Pemerintah**, Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004, **Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah**, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004, **Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tentang **Pedoman Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan belanja Pegawai**.
- Puspitasari Niluh Putu Lindri, Made Pradana Adiputra dan Niluh Gede Erni Sulindawati, 2016, Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Kabupaten Buleleng). **Jurnal Akuntansi**, Vol. 3, No.1, Hal. 1-10
- Sugiyono, 2011, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B**, Bandung: Alfabeta.
- _____, 2010, **Statistik Untuk Penelitian**, Bandung: Alfabeta.
- Sularso, Havid, Restianto, Yanuar. E, 2011, Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, **Media Riset Ekonomi**, Purwokerto.
- Suprpto, 2007, **Manajemen Kinerja Kinerja Keuangan Pemerintah**, Jakarta: Bukukita.
- Susanti dan Saftiana, 2009, **Akuntansi Sektor Publik**, Jakarta: Erlangga.
- Sutrisno, 2005, **Dasar-dasar Keuangan Negara**, Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**. Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**. Jakarta: Republik Indonesia.